

JURNAL

KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI

KELAUTAN DAN PERIKANAN

J. Kebijakan Sosial Ekonomi KP	Vol. 4	No. 1	Hal. 1-116	Jakarta Juni 2014	ISSN 2089-6980
--------------------------------	--------	-------	------------	----------------------	-------------------

Diterbitkan bersama :



Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi
Kelautan dan Perikanan



Jaringan Riset Sosial Ekonomi
Kelautan dan Perikanan



JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Volume 4 Nomor 1, Juni 2014

Penanggung Jawab :

Kepala Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Dewan Redaksi :

Ketua:

Prof. Dr. Zahri Nasution (*Sosiologi Pedesaan*)

Anggota:

Dr. Sonny Koeshendrajana (*Ekonomi Sumberdaya*)

Dr. Edi Susilo (*Sosiologi Perikanan*)

Drs. Masyhuri Imron, MA (*Sosiologi*)

Dr. Zuzy Anna (*Ekonomi Sumberdaya Alam*)

Mitra Bestari :

Dr. Fatuchri Sukadi (*Analisis Kebijakan Perikanan*)

Dr. Andin H. Taryoto (*Sosiologi Pedesaan*)

Dr. Luky Adrianto (*Ekonomi Ekologi*)

Redaksi Pelaksana :

Yayan Hikmayani, M.Si

Tenny Apriliani, M.Si

Heny Lestari, S.E

Asep Jajang Setiadi, S.Pi

Desain dan Tata Letak :

Ilham Ferbiansyah

Alamat Redaksi :

Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Jl. KS. Tubun Petamburan VI - Jakarta 10260

Telp. (021) 53650162, Faks.(021) 53650159

Email: pt.osek@gmail.com

JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN
Volume 4 Nomor 1, Tahun 2014

DAFTAR ISI	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
SISTEM PEREKRUTAN PEKERJA DAN HUBUNGAN KERJA PADA USAHA PERIKANAN TUNA <i>Oleh : Rizki Aprilian Wijaya dan Maulana Firdaus</i>	1 - 13
PENINGKATAN KAPASITAS NELAYAN TERKAIT UPAYA PERTAHANAN NEGARA DI WILAYAH PERBATASAN <i>Oleh : Bayu Vita Indah Yanti</i>	15 - 24
ANALISIS KONEKTIVITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ANTAR WILAYAH PULAU UTAMA DI INDONESIA <i>Oleh : Estu Sri Luhur, Subhechanis Saptanto, Tajerin, Achmad Zamroni dan Freshty Yulia Arthatiani</i>	25 - 42
ANALISA KELEMBAGAAN PENGELOLA ENERGI SEBAGAI PENDUKUNG KEBIJAKAN PENGEMBANGAN ENERGI LAUT <i>Oleh : Rizky Muhartono, Mira, Estu Sri Luhur, dan Siti Hajar Suryawati</i>	43 - 55
IDENTIFIKASI DAN STRATEGI PENGEMBANGAN MATA PENCAHARIAN ALTERNATIF UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI TAMAN WISATA PERAIRAN LAUT BANDA <i>Oleh : Benny Osta Nababan dan Yesi Dewita Sari</i>	57 - 75
EFISIENSI DAN OPTIMISASI INPUT BUDIDAYA IKAN MAS KERAMBA JARING APUNG DI WADUK CIRATA <i>Oleh : Intan Adhi Perdana Putri dan Zuzy Anna</i>	77 - 92
STRATEGI PENGEMBANGAN PASAR BANDENG (<i>Chanos-chanos sp</i>) <i>Oleh : Yayan Hikmayani dan Hertria Maharani Putri</i>	93 - 104
INDIKATOR KEBIJAKAN USAHA PEMBANGUNAN WISATA MASAL DI PULAU-PULAU KECIL <i>Oleh : Mira</i>	105 - 116

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya

UDC 339.13.017:639.2

SISTEM PEREKRUTAN PEKERJA DAN HUBUNGAN KERJA PADA USAHA PERIKANAN TUNA

Rizki Aprilian Wijaya dan Maulana Firdaus

Ketersediaan tenaga kerja perikanan yang semakin langka, dan timpangnya sistem bagi hasil merupakan salah satu isu strategis dalam memetakan permasalahan tenaga kerja pada usaha perikanan tuna. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis sistem perekrutan pekerja dan ketersediaan tenaga kerja serta menganalisis hubungan kerja antara pemilik kapal dan tenaga kerjanya pada usaha perikanan tuna di Kota Bitung. Penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*In-depth Interviews*) kepada 30 orang informan dengan status sebagai pemilik kapal, nahkoda dan anak buah kapal (ABK). Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem perekrutan tenaga kerja terjadi melalui jalur informal. Ketersediaan tenaga kerja ABK lebih mudah dicari dibandingkan dengan tenaga kerja nahkoda. Hubungan kerja antara pemilik kapal dan pekerjanya merupakan sebuah hubungan kerjasama dalam mencapai tujuan keberlanjutan usaha perikanan. Hambatan untuk peningkatan usaha terdapat pada proses penjualan ikan. Peningkatan posisi tawar pelaku usaha dapat dijadikan sebagai jalan keluar pemecahan masalah.

Kata Kunci: perekrutan pekerja, hubungan kerja, perikanan tuna

UDC 339.133.2

PENINGKATAN KAPASITAS NELAYAN TERKAIT UPAYA PERTAHANAN NEGARA DI WILAYAH PERBATASAN

Bayu Vita Indah Yanti

Posisi *centre of gravity* kawasan asia pasifik menyebabkan Indonesia memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap ancaman dari luar. Hal ini muncul karena terbukanya dan tersebarnya wilayah-wilayah Indonesia yang mengakibatkan terganggunya stabilitas keamanan yang dapat mengancam kedaulatan Indonesia. Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (sishankamrata) merupakan sistem pertahanan keamanan yang dilaksanakan Indonesia dengan melibatkan semua komponen bangsa dalam menjaga wilayah kedaulatan Indonesia. Untuk wilayah perbatasan, nelayan memiliki peran strategis sebagai komponen pendukung dalam menjaga kedaulatan wilayah negara. Bagaimana upaya peningkatan kapasitas nelayan di wilayah perbatasan sebagai komponen pendukung sishankamrata selama ini? Pembahasan dilakukan berdasarkan pada studi literatur dan analisis dilakukan berdasarkan teori argumentasi. Berdasarkan hasil pembahasan upaya peningkatan kapasitas nelayan sebagai komponen pendukung sishankamrata seharusnya dilakukan secara komprehensif karena keterkaitan antarinstansi pembinaan nelayan yang melibatkan tidak hanya pada institusi pertahanan.

Kata Kunci: kapasitas, nelayan, pertahanan, negara

**INDEKS ABSTRAK JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN
(ABSTRACT INDEX OF JOURNAL POLICY SOCIO-ECONOMICS MARINE AND FISHERIES)**

ISSN 2089-6980

Vol. 4 No. 1, 2014

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya

UDC 330.44:639.2

ANALISIS KONEKTIVITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ANTAR WILAYAH PULAU UTAMA DI INDONESIA

Estu Sri Luhur, Subhechanis Saptanto, Tajerin, Achmad Zamroni dan Freshty Yulia Arthathiani

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis konektivitas sektor kelautan dan perikanan dalam sistem Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang dilakukan pada tahun 2014. Kajian dilakukan dengan menggunakan data sekunder berupa tabel *interregional input-output* (IRIO) 2010 yang telah dimutakhirkan (*updating*) dari IRIO 2005 menggunakan metode *row-augmented technical coefficient-sheet/RAS*. Hasil kajian menunjukkan bahwa konektivitas sektor kelautan dan perikanan antar wilayah cenderung tinggi yang ditunjukkan oleh besarnya koefisien keterkaitan ke belakang/indeks daya penyebaran dan koefisien keterkaitan ke depan/indeks daya kepekaan lebih besar dari satu satuan unit; namun konektivitas wilayah timur dengan wilayah barat masih rendah yang ditunjukkan oleh masih besarnya dominasi Pulau Jawa, Sumatera dan Bali dalam aktivitas ekonomi sektor kelautan dan perikanan. Hal ini memberikan indikasi aliran distribusi belum berjalan optimal sehingga keterkaitan ekonominya juga terhambat. Untuk itu, penguatan konektivitas antar koridor ekonomi (pulau utama) termasuk pada kegiatan yang terkait dengan kelautan dan perikanan merupakan strategi utama dalam mengimplementasikan MP3EI. Kebijakan yang direkomendasikan untuk mendorong kinerja yang lebih optimal pada usaha kelautan dan perikanan, antara lain: (1) meningkatkan investasi pada sektor industri pengolahan hasil perikanan melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur, institusi dan sumberdaya manusia; dan (2) membangun dan memperbaiki sarana transportasi antar pulau melalui penguatan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN).

Kata Kunci: konektivitas, MP3EI, input-output, IRIO

INDEKS ABSTRAK JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN
(ABSTRACT INDEX OF JOURNAL POLICY SOCIO-ECONOMICS MARINE AND FISHERIES)

ISSN 2089-6980

Vol. 4 No. 1, 2014

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya

UDC 639.2.052.3

ANALISA KELEMBAGAAN PENGELOLA ENERGI SEBAGAI PENDUKUNG KEBIJAKAN PENGEMBANGAN ENERGI LAUT

Rizky Muhartono, Mira, Estu Sri Luhur, dan Siti Hajar Suryawati

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi yang besar akan energi laut. seperti pasang surut, gelombang laut, perbedaan suhu dan salinitas. Potensi energi tersebut dapat diwujudkan menjadi energi listrik yang siap pakai. Implementasi potensi energi ini membutuhkan perhitungan aspek teknis yang tepat, seperti lokasi yang dipilih, jenis teknologi yang akan dipakai, biaya yang dibutuhkan. Selain aspek teknis, aspek kelembagaan harus disertakan dalam perhitungan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kelembagaan pengelola energi dari aspek regulatif, normatif dan kognitif. Pengumpulan data dilakukan pada tahun 2013 di lima kabupaten yaitu, Gresik, Klungkung, Flores Timur, Raja Ampat, Bangka. Wawancara dilakukan kepada informan yang dianggap mengetahui pengelolaan energi di lokasi. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa capaian aspek regulatif terbesar pada Kabupaten Klungkung (Nusa Penida) (37,5%), Capaian aspek normatif terbesar terdapat di kabupaten Nusa Penida dan Flores Timur, masing-masing memiliki nilai capaian 45%, pada aspek kognitif menunjukkan bahwa nilai tertinggi (52,5%) terdapat pada Kabupaten Klungkung (Nusa Penida). Prioritas lokasi untuk dikembangkan berdasarkan aspek kelembagaan (regulatif, normatif dan kognitif) secara berurutan adalah Kabupaten Klungkung, Kabupaten Larantuka, Kabupaten Gresik, Kabupaten Raja Ampat, dan Kabupaten Bangka. Pada wilayah yang memiliki capaian nilai aspek regulatif rendah perlu didorong untuk membuat regulasi dan aturan yang dapat digunakan sebagai landasan dalam pengembangan energi laut. Peningkatan aspek kognitif dan normatif perlu diberikan dukungan berupa penguatan sosialisasi, penguatan kapasitas masyarakat dan partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: kelembagaan, energi laut

**INDEKS ABSTRAK JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN
(ABSTRACT INDEX OF JOURNAL POLICY SOCIO-ECONOMICS MARINE AND FISHERIES)**

ISSN 2089-6980

Vol. 4 No. 1, 2014

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya

UDC 316.324.4

IDENTIFIKASI DAN STRATEGI PENGEMBANGAN MATA PENCAHARIAN ALTERNATIF UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI TAMAN WISATA PERAIRAN LAUT BANDA

Benny Osta Nababan dan Yesi Dewita Sari

Penelitian bertujuan untuk mengetahui potensi sumberdaya alam dan profil SDM yang terdapat di TWP Laut Banda dan menentukan Mata Pencarian Alternatif (MPA) di TWP Laut banda dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem dan sumberdaya perairan dalam mendukung pengelolaan kawasan konservasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yaitu: studi kepustakaan, observasi dan survei serta *Participatory Rural Appraisal* (PRA). Metode analisis data yang digunakan adalah analisis rating scale, analisis studi kelayakan dan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan mata pencaharian alternatif yang sangat layak dikembangkan (Prioritas 1) adalah budidaya rumput laut sedangkan layak dikembangkan (Prioritas 2) adalah *home industry*, kerupuk ikan dan bertanam sayur. Saran dan strategi yang perlu diperhatikan antara lain melakukan sosialisasi, penyuluhan dan pelatihan teknis usaha pada prioritas 1 dan prioritas 2 dengan harapan masyarakat terutama nelayan saat tidak melaut tetap meningkatkan pendapatan ekonomi namun tidak melakukan kegiatan destruktif. Selain itu perlu dibentuk kelembagaan pengelolaan (kelompok) mata pencaharian alternatif di TWP Laut Banda sebagai pelopor yang akan menularkan kemampuannya dalam usaha kepada masyarakat lainnya. Perlu mendapatkan dukungan dan fasilitasi dari pemerintah, terkait dengan mata pencaharian alternatif yang akan dikembangkan seperti pendampingan teknis dan membangun pola kemitraan bisnis untuk memperoleh penyediaan modal dan akses pasar yang lebih luas mengingat sangat sulit akses transportasi di TWP Laut Banda.

Kata Kunci: mata pencarian alternatif, TWP Laut Banda, PRA dan SWOT

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya

UDC 639.2.052.2

EFISIENSI DAN OPTIMISASI INPUT BUDIDAYA IKAN MAS KERAMBA JARING APUNG DI WADUK CIRATA

Intan Adhi Perdana Putri dan Zuzy Anna

Ikan mas merupakan salah satu ikan hasil budidaya dalam Keramba Jaring Apung (KJA) terbanyak di Jawa Barat. Pada tahun 2012 produksi ikan jenis ini sebesar 93.080 ton atau 48% dari total produksi budidaya. Waduk Cirata merupakan salah satu badan air dengan produksi ikan mas yang cukup besar. Namun biaya produksi yang meningkat dan tidak efisiennya penggunaan input produksi, mengakibatkan terjadi penurunan margin keuntungan para pembudidaya tersebut. Salah satu cara yang bisa ditempuh oleh pembudidaya untuk meningkatkan keuntungan adalah dengan cara minimisasi biaya (*cost minimization*) dari input produksi (pakan, benih dan tenaga kerja), sehingga diperoleh kombinasi input produksi dengan biaya terendah dengan produksi ikan yang optimal. Hasil analisis efisiensi unit usaha budidaya KJA di waduk Cirata dengan menggunakan pendekatan DEA menunjukkan bahwa hanya ada 4 % DMU yang *fully efficient*. Sedangkan dari hasil analisis minimisasi biaya melalui pendekatan *Shephard Lemma* adalah diperoleh kombinasi input yang optimal untuk pakan sebesar 23.459,99 kg, benih ikan sebesar 556,62 kg, dan tenaga kerja sebesar 424,18 HKP, untuk satu unit usaha (4 petak) selama satu tahun. Biaya yang bisa dikurangi setiap tahun dengan menggunakan kombinasi input yang optimal adalah sebesar Rp. 3.418.152,05.

Kata Kunci: efisiensi, input optimal Shephard Lemma, DEA , minimisasi biaya

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya

UDC 338.486:639.2

STRATEGI PENGEMBANGAN PASAR BANDENG (*Chanos-chanos sp*)

Yayan Hikmayani dan Hertria Maharani Putri

Makalah ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait dengan strategi pengembangan pasar produk bandeng (*Chanos-chanos sp*). Metode penelitian menggunakan survey dengan pengambilan responden dilakukan secara purposive sampling dan *Focus Group Discussion* (FGD) serta *Expert Judgement* Metode analisis data dilakukan secara deskriptif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor internal strategis hasil penilaian bobot, rating dan skor terhadap setiap faktor yang teridentifikasi pada komponen kekuatan (S) dan komponen kelemahan (W) masing-masing sebesar 0,44 dan 0,26; atau untuk keseluruhan (agregat) dari faktor internal strategis adalah sebesar 0,70. bahwa skor komposit untuk komponen peluang (O) adalah sebesar 0,50 dan untuk komponen ancaman (T) adalah sebesar 0,39, atau untuk keseluruhan (agregat) dari faktor eksternal strategis adalah sebesar 0,89. Strategi diperoleh berdasarkan analisis di dominasi oleh faktor kekuatan (S) dan peluang (O) atau Strategi SO yaitu intensifikasi budidaya dilokasi potensial, pembangunan infrastruktur di lokasi sentra produksi, meningkatkan promosi di negara tujuan ekspor. Hasil Analisis QPSM urutan prioritas langkah-langkah strategi tersebut adalah 1) Intensifkan budidaya di lokasi potensial dengan skor total atraktif sebesar 7,7; 2) pembangunan infrastruktur di lokasi sentra produksi dengan skor total atraktif sebesar 7,5; 3) meningkatkan promosi pasar di negara tujuan ekspor dengan skor total atraktif sebesar 8,8.

Kata Kunci: pengembangan pasar, bandeng (*Chanos-chanos sp*)

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya

UDC 330.44

INDIKATOR KEBIJAKAN USAHA PEMBANGUNAN WISATA MASAL DI PULAU-PULAU KECIL

Mira

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis indikator kebijakan pembangunan wisata masal di pulau-pulau kecil di Kepulauan Seribu, penelitian ini penting dilakukan karena kepulauan kecil yang sangat rentan terhadap pembangunan yang tidak ramah lingkungan. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2012 di Kepulauan Seribu, yang dibiayai oleh Universite de La Rochelle. Indikator kebijakan pembangunan wisata masal ini mengacu pada parameter yang telah ditetapkan oleh Weaver (2000), Shaw et william (2002) et Cournoyer (2005). Ditinjau dari indikator kebijakan atraksi, pulau-pulau wisata yang dikelola oleh swasta menerapkan wisata masal, hal ini bisa dilihat dari karakteristik atraksi (aspek wisata sangat dikomersialkan, bersifat generik, homogen, dan, pembangunan ditujukan secara eksklusif untuk kunjungan wisatawan, dengan tipe wisata pantai dan berjemur. Dari indikator kebijakan tekanan, aspek pembangunan wisata yang terlalu komersial di pulau yang dikelola oleh swasta membuat aspek sosial terabaikan. Untuk pulau-pulau yang dikelola oleh masyarakat dan oleh pemerintah, indikator kebijakan wisata masal hanya bisa dilihat dari elemen musim kunjungan dan permintaan, sedangkan dua elemen lainnya (volume dan asal turis), element tersebut tidak ditemukan dalam pengelolaan wisata. Ditinjau dari indikator kebijakan struktur ekonomi, pulau-pulau wisata yang dikelola oleh swasta menerapkan wisata masal, karena pembangunan wisata dilakukan secara ekstensif, dan pembangunan wisata memiliki multiplier effect yang rendah terhadap masyarakat. Berbeda dengan pulau-pulau yang dikelola masyarakat lokal yang tidak menerapkan wisata masal, karena pengembangan wisata tidak dilakukan secara ekstensif, dan memiliki multiplier effect yang tinggi terhadap masyarakat lokal. Kontrol pemerintah dan masyarakat terhadap aturan pembangunan wisata di pulau yang dikelola oleh swasta sangat lemah.

Kata Kunci: wisata masal, indikator, pulau-pulau kecil, atraksi
